

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan di Indonesia. Infrastruktur juga memegang peranan yang penting sebagai salah satu roda penggerak ekonomi di Indonesia. Ini mengingatkan gerak laju dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia tidak dapat dipisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu pembangunan di sektor ini , menjadi fondasi dari pembangunan infrastruktur di Indonesia.

Pemerintahan Presiden Jokowi melalui draft APBNP-2015 tengah melakukan reformasi kebijakan fiskal di sektor penganggaran pembangunan.Reformasi fiskal dimaksud dapat dicermati dari perubahan gradual dari sisi penganggaran pembangunan, belanja subsidi BBM telah menyusut dari sebelumnya dalam APBN Rp.276 triliun menjadi Rp.81,8 triliun, subsidi LPG turun dari Rp.55,1 triliun menjadi Rp. 28,7 triliun.Sementara ruang fiskal yang didapat dari restrukturisasi belanja subsidi dialihkan antara lain mendukung pembangunan infrastuktur, yang menjadi prioritas utama dengan adanya peningkatan anggaran yang signifikan dari Rp.190 triliun menjadi Rp. 290 triliun.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Pertanian mendapat alokasi anggaran cukup besar (Kemen PUPR angkanya sekitar Rp 33 triliun, kemudian Kementerian Perhubungan Rp 20 triliun dan Kementerian Pertanian Rp 16 triliun). Selain itu, terdapat tambahan dana anggaran prioritas lainnya untuk pembangunan infrastruktur konektivitas Rp.12,9 triliun, alokasi transfer ke daerah Rp.20,5 triliun. untuk tambahan pembangunan infrastruktur pendukung pertumbuhan ekonomi Rp. 49,8 triliun, pemenuhan kewajiban dasar Rp.20,8 triliun dan pengurangan kesenjangan Rp.43,5 triliun.RAPBN-P 2015 menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengurangi anggaran yang tidak berhubungan langsung dengan pembangunan kesejahteraan rakyat dan pemerataan dengan menggeser atau merealokasi sebagian anggaran bendahara umum negara ke anggaran infrastruktur.BPPK, Kemenkeu(2015)

Perekonomian Indonesia tahun 2014 diperkirakan tumbuh sebesar 5,1%, melambat dibandingkan dengan 5,8% pada tahun sebelumnya.Sementara itu, kegiatan investasi juga masih tumbuh terbatas. Kinerja pertumbuhan ekonomi yang masih cukup tinggi terutama ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap solid. Pada tahun 2015, pertumbuhan ekonomi diperkirakan akan lebih tinggi, yaitu tumbuh pada kisaran 5,4-5,8%. Berbeda dengan 2014, di samping tetap kuatnya konsumsi rumah tangga, tingginya pertumbuhan ekonomi di 2015 juga akan didukung oleh ekspansi konsumsi dan investasi pemerintah sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal untuk mendukung kegiatan

ekonomi produktif, termasuk pembangunan infrastruktur. Bank Indonesia(2015)

Berdasarkan perjalanan pembangunan ekonomi Indonesia,infrastruktur ditempatkan sebagai sector vital dalam proses untuk mencapai pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tinggi. Untuk mencapai proses itu dibutuhkan kerja keras agar pembangunan infrastruktur selalu meningkat tiap tahunnya. Pada table 1.1 di bawah ini menjelaskan tentang perkembangan PDRB,Jalan,Listrik,Air,Internet di Indonesia periode 2010-2014.

Tabel 1.1

Perkembangan PDRB Miliar/Kapita, Jalan Km/Kapita, Listrik Megawatt/Kapita,Air m³/Kapita di Indonesia Periode 2010-2014.

Tahun	PDRB Miliar / Kapita	Jalan Km / Kapita	Listrik Megawatt / Kapita	Air m³ / Kapita
2010	28,77	2,04	0,11	10,22
2011	30,11	2,05	0,14	11,33
2012	31,51	2,04	0,18	12,09
2013	32,87	2,04	0,18	12,96
2014	34,12	2,01	0,18	13,38

Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS),2015

Berdasarkan Tabel 1.1, dapat dilihat bahwa PDRB di Indonesia selalu mengalami kenaikan setiap tahunnya. Pada tahun 2010 PDRB di Indonesia sebesar 28,77 miliar/kapita dan pada tahun 2014 PDRB di Indonesia mencapai 34,12 miliar/kapita. Ini dikareanakan terjadi lonjakan pendapatan Nasional di setiap Tahunnya. Karena terjadi kenaikan pada setiap tahunnya maka dapat membantu membuat rencana pelaksanaan program pembangunan berjangka,

membantu merumuskan kebijakan pemerintah dan membandingkan keadaan perekonomian dari waktu ke waktu antar daerah/provinsi.

PDRB berperan sebagai pengukur tingkat pendapatan Bruto yang berada dalam suatu provinsi. PDRB berpengaruh pada perekonomian dengan cara mendistribusikan pendapatan bruto dan kekayaan serta menambah tingkat output. PDRB yang selalu menurun menyebabkan ketidakpastian pembangunan di suatu daerah dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan di suatu daerah akan menurun jika PDRB selalu menurun tiap tahunnya. Bukan hanya itu kegiatan perekonomian juga akan menurun dan mengakibatkan pendapatan Nasional kemunduran serta pengangguran yang semakin bertambah serta semakin merajanya tingkat kemiskinan. Tingginya tingkat kemiskinan tersebut akan berdampak pada tingginya tingkat kriminalitas dalam daerah.

Penelitian mengenai pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi telah banyak dilakukan, namun penelitian ini tetap penting karena pertumbuhan ekonomi (PDRB) perlu di perhatikan mengingat dampaknya sangat luas bagi perekonomian suatu Negara terutama PDRB yang selalu mengalami penurunan tiap tahunnya dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat, yaitu pembangunan suatu daerah akan barang dan jasa yang diakibatkan menurunnya pendapatan rill. PDRB harus segera ditingkatkan agar pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat tercapai.

PDRB tidak dapat terlepas dari peran pembangunan suatu daerah salah satunya infrastruktur. Hal ini dikarenakan infrastruktur merupakan salah satu

investasi/pendapatan daerah. Pada table 1.1, ditunjukkan bahwa infrastruktur jalan selalu mengalami fluktuasi di setiap tahunnya pada tahun 2012 infrastruktur jalan mengalami penurunan menjadi 2,04 km/kapita. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2011). Hal ini terjadi dikarenakan perbaikan jalan yang rusak dan tidak ketersediaan dana perbaikan serta pelebaran jalan. Kemudian infrastruktur jalan pada tahun 2014 kembali mengalami penurunan sebesar 2,01 km/kapita. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya pada tahun (2012-2013).

Pada table 1.1, menunjukkan bahwa produksi listrik di Indonesia pada setiap tahunnya mengalami selalu mengalami peningkatan. Listrik pada tahun 2011 sebesar 0,14 megawatt/kapita dan 0,18 megawatt/kapita pada tahun 2012. Ini disebabkan karena adanya peningkatan tegangan listrik dan produksi listrik tiap tahunnya. Karena jumlah penduduk Indonesia banyak dan jumlah produksi listrik juga banyak maka setiap penduduk Indonesia mendapatkan produksi listrik yang cukup baik. Pada table 1.1, bahwa air di Indonesia mengalami kenaikan pada tiap tahun 2012 sebesar 12,09 m³/kapita dibandingkan dengan tahun sebelumnya (2011). Kemudian produksi air di Indonesia mengalami kenaikan kembali pada tahun 2014 sebesar 13,38 m³/kapita. Hal ini di sebabkan dikarenakan adanya peningkatan jumlah produksi air di Indonesia. Dengan begitu setiap penduduk Indonesia mendapatkan produksi air yang cukup baik.

Para ahli ekonomi percaya bahwa segala perdebatan merupakan cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan produk domestik bruto) setinggi-tingginya sehingga dapat melampaui pertumbuhan penduduk. Dengan cara

tersebut maka akan secara otomatis akan meningkatkan pendapatan perkapita dan terjadi pula peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karenanya sasaran utama dalam pembangunan ekonomi di tekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Simon Kuznet menyatakan bahwa *“a country's economic growth as a long term rise in capacity to supply increasingly diverse economic goods to its population, this growing capacity based on advancing technology and the institutional and ideological adjustments that's it demands”* (Todaro,2000:155). Pertumbuhan suatu Negara dipengaruhi oleh akumulasi modal (investasi pada tanah, peralatan, prasarana dan sarana) sumber daya alam, sumber daya manusia baik jumlah maupun tingkat kualitas penduduknya, kemajuan teknologi, akses terhadap informasi, keinginan untuk melakukan inovasi dan mengembangkan diri serta budaya kerja. (Todaro,2000:37)

Selama ini, pemerintah telah mengeluarkan banyak waktu, tenaga dan dana untuk pembangunan di seluruh wilayah Indonesia. Hasil pembangunan dapat dilihat di seluruh wilayah Indonesia meskipun dapat dilihat terdapat ketimpangan yang menunjukkan adanya perbedaan kecepatan pembangunan antar daerah satu dengan daerah lainnya. Terlihat ketimpangan yang cukup besar antara Indonesia bagian barat dengan Indonesia bagian timur. Pulau Jawa dengan wilayah lainnya kemudian daerah perkotaan dengan daerah pedesaan. Ini terbukti dari ketimpangan nilai investasi dari produk di masing-masing wilayah.

Lebih dari 50 persen investasi berada di pulau jawa yang hanya mencakup 7 persen wilayah Indonesia. Sedangkan output atau Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) di Pulau Jawa menghasilkan lebih dari 60 persen total output Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi pembangunan di wilayah Pulau Jawa lebih kuat dari pada pulau lainnya dan menunjukkan bahwa ketimpangan pembangunan antar wilayah di Indonesia merupakan ketidak merataan pembangunan di seluruh Indonesia. Ketinggalan suatu daerah dalam membangun di pengaruhi oleh banyak hal, salah satunya adalah rendahnya daya tarik suatu daerah yang menyebabkan tingkat aktifitas ekonomi yang rendah. Suatu daerah yang tidak memiliki sumber daya (baik manusia maupun alam) serta kurangnya insentif yang ditawarkan (prasarana infrastruktur, perangkat keras dan lunak, keamanan dan sebagainya). Dapat menyebabkan suatu daerah tertinggal dalam pembangunan.

Untuk mengejar ketinggalan dari daerah lainnya, terdapat beberapa alternatif pengembangan suatu daerah. Alternatif tersebut dapat berupa investasi yang langsung diarahkan pada sector produktif atau investasi pada bidang *social overhead* seperti pembangunan jalan, fasilitas pendidikan dan kesehatan serta prasarana infrastruktur lainnya. Pilihan ditentukan oleh ciri daerah serta masalah institusionalnya. Pada banyak Negara berkembang, investasi pada prasarana infrastruktur menjadi suatu pilihan yang disukai dan mempunyai porsi yang sangat besar dari total pengeluaran pemerintah. Ini menunjukkan besarnya peran pemerintah dalam pengadaan prasarana infrastruktur khususnya sektor transportasi, komunikasi serta energi. Sedangkan pengeluaran publik lainnya seperti

pada sektor kesehatan dan pendidikan meskipun cenderung diabaikan namun mempunyai tingkat produktifitas yang tinggi karena mempunyai dampak langsung maupun tidak langsung berupa peningkatan produktifitas sumber daya manusia. Pengeluaran pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi merupakan indikator yang komprehensif dari produktifitas pengeluaran publik. Ada dua komponen yang diukur yaitu, kontribusi output sektor publik terhadap pertumbuhan ekonomi dan efisiensi pengeluaran ini terhadap outputnya.

Adam Smith menyatakan bahwa, “ *Good roads, canals and navigable rivers, by diminishing the expense of carriage, put the remote parts of the country more nearly upon a level with those in the neighboring town. They are upon that account the greatest of all improvements*”. Kodoatie(2003). mendefinisikan infrastruktur sebagai fasilitas-fasilitas fisik yang dikembangkan atau dibutuhkan oleh agen-agen publik untuk fungsi-fungsi pemerintah dalam penyediaan air, tenaga listrik, pembuangan limbah, transportasi dan pelayanan-pelayanan lainnya untuk memfasilitasi tujuan-tujuan ekonomi dan sosial. Sistem infrastruktur merupakan pendukung utama fungsi-fungsi sosial dan sistem ekonomi dalam kehidupan sehari-hari masyarakat.

Sistem infrastruktur dapat di definisikan sebagai fasilitas-fasilitas atau struktur-struktur dasar, peralatan-peralatan, instalasi-instalasi yang dibangun dan yang dibutuhkan untuk berfungsinya sistem sosial dan sistem ekonomi masyarakat (Kodoatie, 2003).

The World Bank (1994) membagi infrastruktur menjadi tiga yaitu :

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktifitas ekonomi, meliputi *public utilities* (tenaga, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), *public work* (jalan, bendungan, kanal, irigasi, drainase), dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, lapangan terbang, dan sebagainya).
2. Infrastruktur social, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan, dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi, meliputi penegakan hukum, control administrasi dan koordinasi.

Pemerintah melalui peraturan Presiden Nomer 42 Tahun 2005 tentang komite percepatan penyediaan infrastruktur. Menjelaskan jenis infrastruktur yang penyediaannya diatur oleh pemerintah, yaitu: infrastruktur transportasi, infrastruktur jalan, infrastruktur pengairan, infrastruktur air minum dan sanitasi, infrastruktur telematika, infrastruktur tenaga listrik, dan infrastruktur pengangkutan gas dan minyak bumi. Penggolongan infrastruktur diatas dapat dikategorikan sebagai infrastruktur dasar, karena sifatnya yang dibutuhkan masyarakat luas sehingga perlu dia atur oleh pemerintah.

Berdasarkan uraian diatas, infrastruktur jalan merupakan sektor penting dalam distribusi ekonomi penghubung antar wilayah, infrastruktur listrik sebagai penunjang sektor industri dalam kegiatan produksi ekonomi serta infrastruktur air merupakan faktor yang menunjang aktifitas ekonomi karena

ketiga infrastruktur tersebut dapat meningkatkan pendapatan serta menunjang laju pertumbuhan ekonomi. Untuk mengetahui apakah Infrastruktur Jalan, Listrik dan Air mempengaruhi Pertumbuhan Ekonomi maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan mengambil judul : **“PENGARUH INFRASTRUKTUR TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI INDONESIA PERIODE TAHUN 2010-2014”**.

B. Batasan Masalah

Mengingat begitu banyak permasalahan yang harus dipecahkan agar pembahasan tidak terlalu luas dan tetap mengarah sesuai judul, maka perlu dilakukan pembatasan masalah. Dalam hal ini peneliti berfokus pada pengaruh infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi. Permasalahan yang di bahas peneliti adalah bagaimana infrastruktur seperti Jalan, Listrik, Air dan Internet mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap output yang diwakilkan oleh variabel pendapatan perkapita (PDRB).

Kemudian untuk mengetahui kontribusi prasarana infrastruktur terhadap pertumbuhan perkapita (PDRB) maka dapat diketahui jenis prasaran infrastruktur yang memberikan pengaruh besar terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia. Sehingga dapat ditentukan arah kebijakan pemerintah terhadap perkembangan infrastruktur yang sesuai dengan Indonesia.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dengan latar belakang permasalahan diatas, terlihat bahwa pembangunan infrastruktur prasarana di Indonesia sudah berlangsung cukup

lama dan investasi yang dikeluarkan sudah cukup sangat besar. Namun masih cukup banyak yang dihadapi negara kita khususnya perencanaan yang lemah, kuantitas yang belum mencukupi kualitas yang rendah dan sebagainya. Kemudian untuk mengetahui sejauh mana pertumbuhan Infrastruktur seperti jalan, listrik, air pada periode tahun 2010-2015 di Negara Indonesia.

Rumusan masalah tersebut dimasukkan kedalam pertanyaan peneliti. Sebagai berikut:

1. bagaimana pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Listrik terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh Infrastruktur Air terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur Jalan terhadap pertumbuhan ekonomi.
2. Untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur Listrik terhadap pertumbuhan ekonomi.
3. Untuk mengetahui pengaruh Infrastruktur Air terhadap pertumbuhan ekonomi.

E. Manfaat Penelitian

1. Bagi Peneliti

Diharapkan dapat menambah pengetahuan dan wawasan terhadap analisis Pengaruh pertumbuhan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

2. Bagi Peneliti selanjutnya

Diharapkan dapat meningkatkan motivasi guna memiliki wawasan dan pengetahuan yang lebih luas dan dapat dijadikan bahan referensi bagi mahasiswa yang akan membutuhkannya.

3. Bagi Pemerintah

1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Indonesia dalam mengambil kebijakan dan langkah-langkah dalam mengambil kebijakan pembangunan infrastruktur di Indonesia.

2) Diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan dan kebijakan di masa yang akan datang.